

Strategi Pengelolaan Perikanan Udang Pasca Moratorium Perikanan Di Provinsi Papua Barat

Shrimp Fishery Management Strategy After Fisheries Moratorium in West Papua
Province

**Zulkifli Henan^{1*}, Selvi Tebay², Roni Bawole², Ridwan Sala², Paulus Boli²,
Gandi Y.S. Purba²**

¹Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Manokwari, 98314, Indonesia

²Program Studi S2 Sumberdaya Akuatik, Program Pascasarjana Universitas Papua, Jalan Gunung
Salju Amban, Manokwari, 98314, Papua Barat, Indonesia

*Korespondensi: zulkiflihenan@gmail.com

ABSTRAK

Pemberlakuan moratorium berdampak pada industri perikanan udang yaitu terjadinya penghentian operasi penangkapan udang dan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan bagi sebagian perusahaan udang di Provinsi Papua Barat. Tujuan penelitian adalah menyusun strategi Pengelolaan Perikanan udang di Provinsi Papua Barat setelah penghentian moratorium perikanan agar industri perikanan udang dapat memberikan kontribusi bagi penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan asli daerah. Analisis SWOT digunakan untuk melakukan identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai dasar arahan kebijakan perikanan udang. Rekomendasi strategi pengelolaan Perikanan Udang; 1) Peningkatan kesadaran masyarakat pesisir terhadap kelestarian lingkungannya. 2) Optimalisasi produktivitas perikanan tangkap skala kecil melalui peningkatan kualitas SDM nelayan. 3) Penegakkan hukum secara tegas dan peningkatan sistem pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan berbasis masyarakat, termasuk peningkatan kualitas SDM pengawas. 4) Pengembangan infrastruktur perikanan tangkap, termasuk sistem logistik penyediaan BBM. 5) Peningkatan kerjasama usaha penangkapan ikan melalui program kemitraan, untuk menjamin keberlanjutan biaya operasional, dan pengembangan investasi usaha. 6) Pengembangan nilai tambah hasil perikanan tangkap untuk mensejahterakan pendapatan nelayan.

Kata kunci: Kebijakan, Perikanan Udang, Moratorium Perikanan, Papua Barat

ABSTRACT

The implementation of the fisheries moratorium has an impact on the shrimp industry, namely the cessation of shrimp fishing operations and termination of employees of some shrimp companies in the West Papua Province. The aim of this research is develop a shrimp fisheries management strategy at West papua Province after the end of the moratorium on fisheries so that the shrimp industry can contribute to job creation and increase local revenue. SWOT analysis is used to identify internal and external factors as the basis for the shrimp fisheries policy direction. Recommended strategies for managing Shrimp fisheries; 1) Increasing awareness of coastal communities towards environmental sustainability. 2) Optimizing the productivity of small-scale capture fisheries through improving the quality of fishermen's human resources. 3) Strict law enforcement and improvement of community based fish resource utilization monitoring systems, including improving the quality of HR supervisors. 4) Development of capture fisheries infrastructure, including fuel supply logistics systems. 5) Increased cooperation in fishing

business through partnership programs, to ensure the sustainability of operational costs, and the development of business investment. 6) Development of value-added capture fisheries for the welfare of fishermen's income.

Keywords: Policy, Shrimp Fishery, Fisheries Moratorium, Papua Barat

PENDAHULUAN

Papua Barat merupakan salah satu Provinsi yang memiliki potensi udang dengan kualitas ekspor. Armada tangkap untuk penangkapan udang yang beroperasi di Provinsi Papua Barat merupakan kapal eks asing yang menggunakan alat tangkap pukat udang. Pemberlakuan moratorium kapal eks asing dan pelarangan penggunaan pukat udang diduga memberikan dampak pada sektor industri perikanan udang di Provinsi Papua Barat. Dampak yang ditimbulkan akan sangat menentukan keberlanjutan perikanan udang di Provinsi Papua Barat.

Selain ikan, udang merupakan komoditi unggulan dan mempunyai nilai ekspor yang tinggi. Sehingga banyak nelayan yang menangkap udang di perairan Provinsi Papua Barat. Potensi Udang yaitu Kabupaten Teluk Bintuni sekitar 291 ton per tahun, dan Kabupaten Sorong Selatan sekitar 3.861 ton per tahun (DKP Papua Barat, 2016). Perikanan udang menjadi sektor unggulan dengan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Peran industri perikanan sangat penting dalam upaya akselerasi pembangunan di Provinsi Papua Barat.

Provinsi Papua Barat memiliki Potensi Udang yang cukup besar. Produksi penangkapan udang didominasi oleh armada milik perusahaan udang dengan daerah penangkapan diantaranya tersebar di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong Selatan. Hasil tangkapan udang didaratkan di Kota sorong karena pabrik produksi udang banyak terdapat di Kota Sorong.

Pemberlakuan Moratorium perijinan perikanan berdampak pada operasional dan produksi udang di Provinsi

Papua Barat. Moratorium menyebabkan terhentinya operasional Perusahaan yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan dan anak buah kapal. Pemberlakuan moratorium perijinan perikanan selain diduga berdampak pada kondisi ekologi, juga diduga berdampak pada kondisi sosial ekonomi pelaku usaha, karyawan, nelayan maupun konsumen.

Peningkatan produksi tangkap nelayan lokal dan tradisional di Papua Barat (Manokwari, Kaimana, Teluk Bintuni dan Sorong) belum mampu mengisi celah produksi yang hilang akibat berhentinya operasi penangkapan sejumlah besar perusahaan-perusahaan skala besar di bidang perikanan tangkap. Peningkatan produksi nelayan lokal dan tradisional ini terlalu rendah secara agregat karena kapasitas tangkap yang kecil dan jenis hasil tangkapan yang belum bernilai tinggi atau berorientasi pasar ekspor. Sebagian besar nelayan tidak menghendaki pemberhentian moratorium. Hal ini disebabkan karena jika kapal-kapal perusahaan kembali beroperasi, dikhawatirkan mengakibatkan daerah penangkapan nelayan menjadi sempit (Unipa, 2016).

Dalam kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan diperlukan adanya pertimbangan dampak pada aspek ekologis serta sosial ekonomi agar keberlanjutan pengelolaan perikanan udang di Provinsi Papua Barat dapat tercapai. Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan adanya arah strategi perikanan udang paska Pemberlakuan Moratorium Perikanan di Provinsi Papua Barat.

Analisis kebijakan sebagai sebuah proses “pra-proses-kebijakan”. Analisis kebijakan disini dimaksud sebagai terjemahan dari *analysis for policy*, bukan *analysis of policy*. Proses

kebijakan adalah proses yang diawali dengan perumusan kebijakan, dilanjutkan dengan implementasi kebijakan, dan kemudian evaluasi kebijakan. Pada titik ekstrim, analisis kebijakan adalah proses tempat sebuah kebijakan dipikirkan untuk dibuat, dan belum dibuat itu sendiri (Dwidjowojoto, 2007).

Analisis kebijakan ialah proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik (Williams, 1971). Kebijakan publik ialah keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat. Analisis kebijakan akan menghasilkan dan menyajikan informasi yang dapat menjadi landasan bagi para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan. Jadi analisis kebijakan lebih berkenaan dengan bagaimana pengambil keputusan mendapatkan sejumlah alternatif kebijakan yang terbaik, sekaligus alternatif kebijakan yang terpilih sebagai rekomendasi dari analisis kebijakan atau tim analisis kebijakan. Peran analisis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang akan diterima oleh publik, dan bukan asal menguntungkan pengambil kebijakan.

Kebijakan perikanan udang diperlukan untuk menunjang keberlanjutan pengelolaan perikanan udang. Analisis kebijakan perlu mencakup aspek sosial dan ekonomi dari pelaku usaha perikanan yaitu rumah tangga perikanan, pedagang udang dan perusahaan udang. Keberlanjutan perikanan udang pasca moratorium untuk memastikan keberlanjutan perikanan udang dapat dikelompokkan menjadi beberapa faktor yaitu faktor regulasi atau kebijakan yang tidak berubah-ubah, faktor ekonomi dan ekologi dari sumberdaya. Kebijakan yang tidak berubah-ubah akan menjamin keberlanjutan kegiatan perikanan. Pengetahuan mengenai persepsi masyarakat diperlukan untuk menjadi dasar sebuah

kebijakan pengelolaan perikanan. Persepsi masyarakat akan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi mereka. Kondisi perairan yang sehat merupakan salah satu faktor yang mendukung perikanan berkelanjutan.

Penelitian mengenai dampak pemberlakuan moratorium perikanan yang dilakukan oleh beberapa peneliti lebih banyak membahas mengenai dampak dan kebijakan perikanan secara umum. Unipa pada tahun 2016 melakukan kajian mengenai dampak pemberlakuan moratorium perikanan dengan berfokus pada dampak ekonomi dan sosial atas pemberlakuan moratorium perikanan. Nurlaili *et.al.* (2016) melakukan penelitian mengenai dampak kebijakan moratorium terhadap sektor usaha perikanan yang salah satu kesimpulannya adalah pemerintah perlu melakukan kebijakan transisi melalui penciptaan mata pencaharian alternatif yang sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki. Penelitian tersebut juga membahas mengenai kebijakan perikanan secara umum. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini diarahkan untuk berfokus pada kebijakan perikanan udang di Papua Barat. Tujuan penelitian adalah memberikan arahan kebijakan setelah penghentian moratorium perikanan agar industri perikanan udang dapat memberikan kontribusi bagi penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yaitu Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat yang merupakan daerah produksi udang. Penelitian dimulai pada Bulan Mei s/d Juli 2019. Lokasi Penelitian tersaji pada Gambar 1.

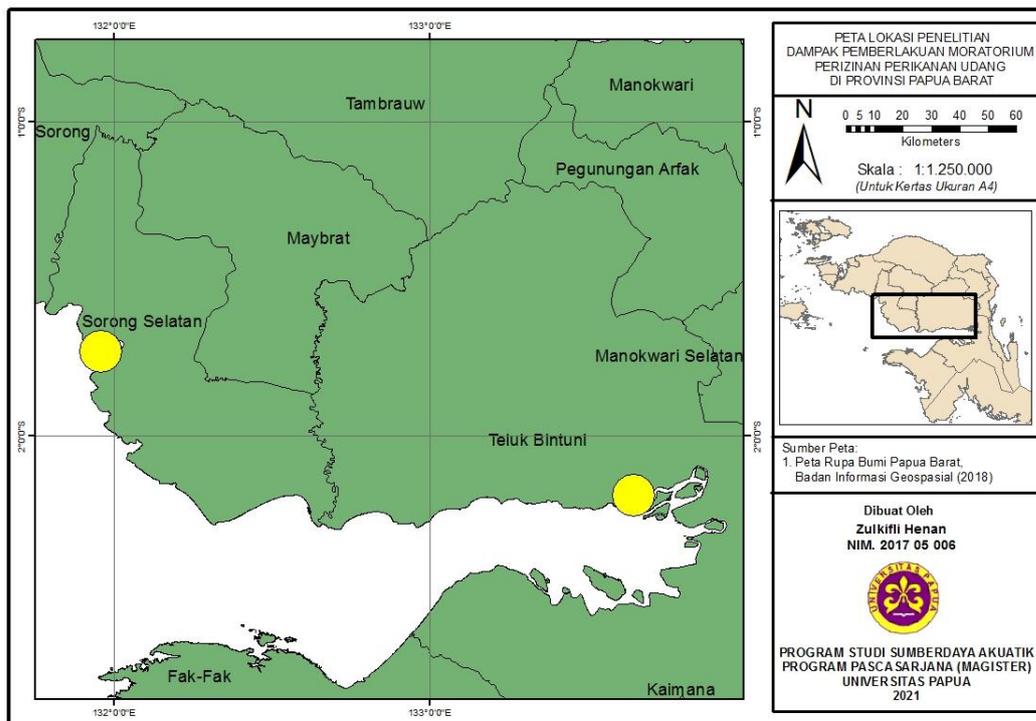
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif yang bertujuan untuk mendapatkan fakta yang ada. Penelitian eksploratif digunakan untuk menemukan sesuatu yang baru dapat berupa pengelompokan suatu gejala atau fakta tertentu

(Hardani *et.al*, 2020). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena yang biasanya merupakan kelanjutan dari penelitian eksploratif (Priyono, 2016).

Pengambilan data menggunakan metode wawancara langsung dilapangan menggunakan metode survey yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah variabel pada suatu kelompok masyarakat melalui wawancara langsung dan berpedoman pada pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (Singarimbun, 1995). Responden disekat atau dilapis kedalam beberapa kelompok berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pengetahuan mengenai moratorium serta dampak moratorium dengan pengambilan contoh Purposive Sampling guna mendapatkan informasi melalui kuisioner yang dibuat.

Purposive sampling digunakan apabila sasaran sampling telah memiliki

karakteristik tertentu sehingga tidak mungkin diambil sampel lain yang tidak memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan (Mulyatiningsih, 2011). Pertimbangan menggunakan Purposive Sampling karena metode pengambilan sampel dengan metode ini sengaja memilih responden berdasarkan kebutuhan data yang diinginkan dengan ketentuan peran serta atau peran responden dalam usaha perikanan udang serta pertimbangan lain yaitu kemudahan dalam wawancara dan kesediaan responden untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Responden pada penelitian ini adalah rumah tangga perikanan sebanyak 23 responden, pedagang sebanyak 14 responden, konsumen sebanyak 14 responden, industri Perikanan yang terkena dampak moratorium sebanyak 11 responden serta diskusi dengan ahli perikanan sebanyak 4 ahli perikanan. Data hasil wawancara diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Excell.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Variabel yang diukur dalam penelitian ini dikelompokkan kedalam dua kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang diamati mencakup potensi, tingkat pemanfaatan dan kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di lokasi penelitian serta kondisi infrastruktur penunjang dan permodalan nelayan lokal. Faktor eksternal yang diamati mencakup kebijakan pemerintah, kebutuhan atau permintaan udang serta perkembangan pemasaran produk perikanan. Pengumpulan data primer untuk mengamati faktor internal dan faktor eksternal dilakukan dengan menggunakan kuisioner dengan sasaran responden rumah tangga perikanan, perusahaan, pedagang, konsumen dan diskusi dengan pakar perikanan. Faktor-faktor lingkungan internal dan faktor eksternal yang terdapat pada perikanan

udang di Papua Barat disajikan pada Tabel 1.

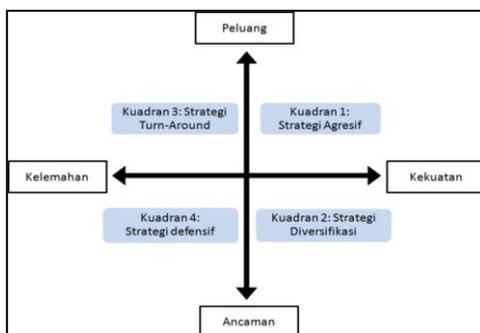
Pengumpulan data sekunder yang mendukung penelitian dilakukan dengan studi berbagai pustaka dari hasil penelitian terdahulu maupun tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap laporan penelitian, publikasi ilmiah yang ada.

Berdasarkan faktor internal dan eksternal tersebut, maka dilakukan penilaian terhadap masing-masing faktor. Penilaian dimulai dengan menentukan peringkat masing-masing faktor. Peringkat masing-masing faktor ditentukan dengan skala 1–4. Skala 1 menyatakan pengaruh kecil, Skala 2 menyatakan pengaruh Sedang, skala 3 menyatakan pengaruh besar dan skala 4 menyatakan pengaruh sangat besar.

Tabel 1. Faktor Internal dan Faktor Eksternal Perikanan Udang

Faktor Internal	
Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki perairan laut dengan potensi sumberdaya udang yang besar (jenis dan jumlah).2. Tersedia jumlah tenaga kerja yang cukup3. Lingkungan perairan lautnya memiliki tingkat kesuburan yang baik sehingga terdapat daerah penangkapan udang yang potensial4. Kondisi geografis yang strategis	<ol style="list-style-type: none">1. Pemanfaatan sumberdaya udang belum optimal dan merata2. Masih terbatasnya infrastruktur dasar dan prasarana perikanan udang3. Kemampuan permodalan nelayan setempat masih terbatas4. Kurangnya penguasaan teknologi dan minimnya informasi
Faktor Eksternal	
Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none">1. Permintaan komoditi udang terus meningkat2. Kebijakan penghentian izin usaha penangkapan ikan oleh armada asing di ZEE Indonesia3. Digitalisasi Pemasaran produk udang4. Produk udang yang diekspor terdata	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah2. Fluktuasi Harga dan kelangkaan BBM3. Moda transportasi yang mahal4. Sarana telekomunikasi/ jaringan telephon masih terbatas

Untuk menganalisis strategi pengelolaan perikanan udang di Provinsi Papua Barat, digunakan Analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal pengembangan Perikanan Udang. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memksimalkan kekuatan (*Strenghts*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*) (Rangkuti, 2006). Diagram analisis SWOT tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram Analisis SWOT

Untuk memetakan faktor eksternal dan faktor internal dalam diagram analisis SWOT, maka dilakukan perhitungan selisih setiap faktor. Untuk mendapatkan nilai faktor internal maka dilakukan perhitungan selisih antara kekuatan dengan kelemahan (S-W) dan untuk mendapatkan nilai faktor eksternal dilakukan perhitungan selisih antara peluang dan ancaman (O-T). Nilai faktor internal akan berada pada sumbu X dan nilai faktor eksternal berada pada sumbu Y.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumberdaya udang di lokasi penelitian diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan perikanan. Estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumberdaya udang di lokasi penelitian digunakan

sebagai pertimbangan utama dalam menentukan formulasi pembagian alokasi sumberdaya udang. Daerah penangkapan udang pada lokasi penelitian berada pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 yang meliputi Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. Setelah adanya pemberlakuan moratorium, perusahaan tidak lagi beroperasi sehingga operasi penangkapan udang terfokus pada WPP 715 atau daerah yang berdekatan dengan domisili dari nelayan.

Perikanan udang di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong Selatan yang masuk dalam WPP 715 masih berada pada fase perkembangan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah prediksi tangkapan yang masih meningkat seiring meningkatnya jumlah upaya tangkapan per tahun. Artinya, apabila terjadi penambahan jumlah upaya tangkap melalui penambahan armada tangkap pada perikanan skala kecil masih dapat dilakukan. Penambahan armada masih dapat dilakukan dengan melakukan monitor ketat karena WPP 715 masuk dalam kategori *Fully Exploited* berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 50 tahun 2017.

Berdasarkan hasil perhitungan CPUE pada lokasi penelitian, diperoleh hasil tingkat pemanfaatan udang di perairan Teluk Bintuni dan Sorong Selatan sebelum diberlakukannya moratorium adalah 50,01% atau masuk dalam kategori *Fully exploited* berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 50 tahun 2017. Setelah adanya pemberlakuan moratorium perikanan, tingkat pemanfaatan udang di perairan Teluk Bintuni dan Sorong Selatan mengalami penurunan menjadi 15,99% atau masuk dalam kategori *moderate* yang berarti upaya penangkapan dapat ditambah. Penambahan upaya dapat dihentikan atau dikurangi apabila akan atau telah mencapai titik ekuilibrium yaitu titik keseimbangan antara upaya dan prediksi potensi lestari udang.

Pengelolaan sektor perikanan udang di suatu daerah, secara umum dipengaruhi oleh lingkungan strategisnya baik lingkungan internal maupun eksternal. Faktor internal dan faktor eksternal ini yang dapat menentukan tingkat keberhasilan dalam upaya perencanaan dan implementasinya. Faktor internal dan eksternal secara sinergis akan menentukan kekuatan dan kelemahan kawasan terutama pemerintah daerah untuk tetap berada pada jalur kewenangannya dalam menyikapi permasalahan dan peluang yang ada maupun yang akan datang. Kondisi tersebut akan menempatkan eksistensi yang sangat baik bagi perencanaan pengembangan perikanan udang kedepan.

Strategi adalah cara terbaik untuk mencapai suatu sasaran atau untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Selain itu strategi berarti penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi atau perusahaan. Pada saat perusahaan ingin memenangkan persaingan pada suatu industri satu hal yang harus diputuskan yaitu siasat yang harus diberlakukan. Keberhasilan suatu siasat tidak lepas dari sumber daya dan kecakapan pendayagunaannya (Pardede, 2011).

Lingkungan internal merupakan semua kondisi dan faktor yang berada di dalam batas wilayah administratif (yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, kelembagaan dan sosial ekonomi) dan wewenang pemerintah daerah yang mungkin dapat berfungsi sebagai kekuatan yang dapat mendukung dan mendorong pemerintah daerah dalam mengemban misi dan mewujudkan visinya atau sebaliknya sebagai kelemahan yang dapat menghambat dalam mengemban misi dan mewujudkan visinya. Faktor –faktor internal yang terdapat pada perikanan udang tersaji pada Tabel 2.

Lingkungan eksternal merupakan semua kondisi dan faktor yang berada diluar wilayah dan wewenang Pemerintah daerah yang mungkin dapat dijadikan sebagai peluang dalam mengemban misi dan mewujudkan visi atau sebaliknya menjadi suatu ancaman. Lingkungan eksternal mencakup teknologi, pasar, konsumen, investor, donatur (dalam dan luar negeri) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penilaian terhadap masing-masing faktor eksternal disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 2. Penilaian Faktor Internal pada Perikanan Udang

No	Parameter	Bobot	Skor	Jumlah	
A Kekuatan					
1	Memiliki perairan laut dengan potensi sumberdaya udang yang besar (jenis dan jumlah).	0,15	3,00	0,45	
2	Tersedia jumlah tenaga kerja yang cukup	0,12	2,43	0,29	
3	Lingkungan perairan lautnya memiliki tingkat kesuburan yang baik sehingga terdapat daerah penangkapan udang yang potensial	0,15	3,00	0,45	
4	Kondisi geografis yang strategis	0,15	3,00	0,45	
				Jumlah	1,65
B Kelemahan					
1	Pemanfaatan sumberdaya udang belum optimal dan merata	0,11	2,29	0,26	
2	Masih terbatasnya infrastruktur dasar dan prasarana perikanan udang	0,14	2,71	0,37	
3	Kemampuan permodalan nelayan setempat masih terbatas	0,09	1,86	0,17	
4	Kurangnya penguasaan teknologi dan minimnya informasi	0,09	1,71	0,15	
				Jumlah	0,94

Tabel 3. Faktor Eksternal Perikanan Udang

No	Parameter	Bobot	Skor	Jumlah
A Peluang				
1	Permintaan komoditi udang terus meningkat	0,22	3,00	0,66
2	Kebijakan penghentian izin usaha penangkapan ikan oleh armada asing di ZEE Indonesia	0,22	3,00	0,66
3	Digitalisasi Pemasaran produk udang	0,08	1,14	0,10
4	Produk udang yang diekspor terdata	0,09	1,29	0,12
Jumlah				1,55
B Ancaman				
1	Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah	0,07	1,00	0,07
2	Fluktuasi Harga dan kelangkaan BBM	0,07	1,00	0,07
3	Moda transportasi yang mahal	0,10	1,43	0,15
4	Sarana telekomunikasi/ jaringan telephon masih terbatas	0,13	1,71	0,22
Jumlah				0,51

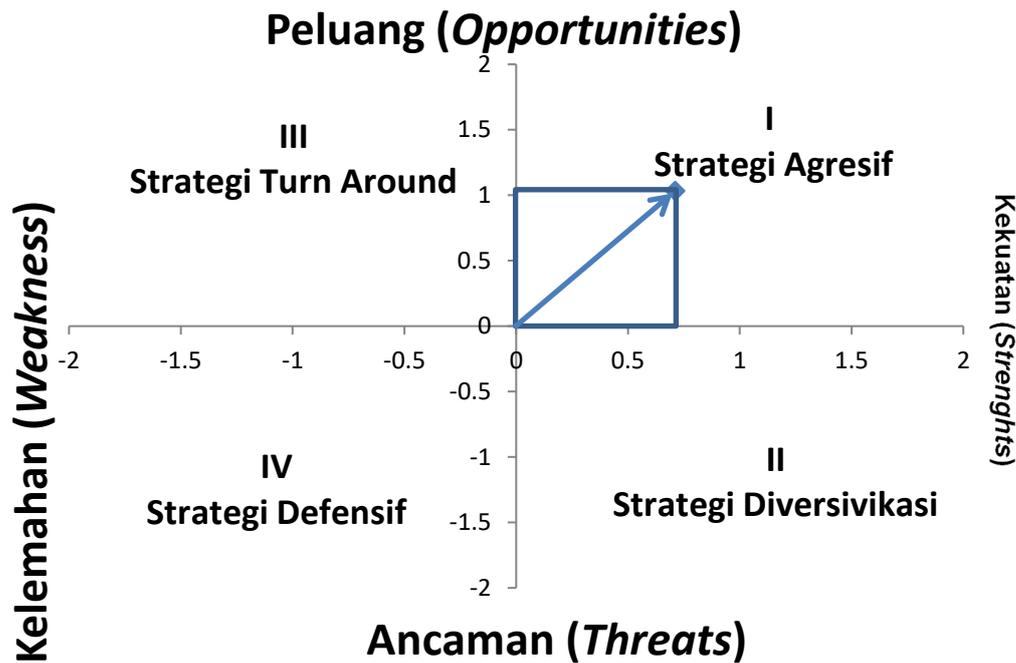
Setelah kondisi lingkungan strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) sektor perikanan udang di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Teluk Bintuni teridentifikasi, maka selanjutnya dilakukan perumusan strategi pengembangannya dengan menggunakan matriks atau analisis SWOT (*strengths-weakness-opportunity-threats*). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat mengatasi atau meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Rumusan strategi yang diperlukan untuk pengembangan perikanan udang di Provinsi Papua Barat hasil generating dari matriks SWOT dapat dilihat pada Tabel 4.

Untuk memetakan faktor eksternal dan faktor internal dalam hasil analisis SWOT, maka dilakukan perhitungan selisih setiap faktor. Untuk mendapatkan nilai faktor internal maka dilakukan perhitungan selisih antara kekuatan dengan kelemahan (S-W) dan untuk mendapatkan nilai faktor eksternal maka dilakukan perhitungan selisih antara peluang dan ancaman (O-T). Nilai faktor internal akan berada pada sumbu X dan nilai faktor Eksternal berada pada sumbu Y. Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3 dapat diperoleh

nilai faktor internal (Kekuatan – Kelemahan) yaitu 0,71 dan nilai untuk faktor eksternal (Peluang – ancaman) yaitu 1,03. Jika nilai tersebut dipetakan dalam diagram analisis SWOT, maka posisinya akan berada pada kuadran I yang mendukung kebijakan perikanan udang secara agresif dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Matriks space strategi pengembangan perikanan udang tersaji pada Gambar 3.

Tabel 4. Matriks SWOT untuk Pengelolaan Perikanan Udang

	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki perairan laut dengan potensi sumberdaya udang yang besar (jenis dan jumlah). 2. Tersedia jumlah tenaga kerja yang cukup 3. Lingkungan perairan lautnya memiliki tingkat kesuburan yang baik sehingga terdapat daerah penangkapan udang yang potensial 4. Kondisi geografis yang strategis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan sumberdaya udang belum optimal dan merata 2. Masih terbatasnya infrastruktur dasar dan prasarana perikanan udang 3. Kemampuan permodalan nelayan setempat masih terbatas 4. Kurangnya penguasaan teknologi dan minimnya informasi
Faktor Eksternal		
Peluang (<i>Opportunity</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan nilai lebih hasil tangkap perikanan udang yang mampu memanfaatkan komoditas udang yang ada. 2. Optimalisasi produktivitas Perikanan udang skala kecil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur perikanan udang. 2. Penyiapan dan peningkatan kualitas SDM pelaku usaha perikanan udang 3. Penyusunan mekanisme kredit yang aman dan tepat untuk nelayan kecil 4. Penciptaan sistem investasi perikanan udang yang menarik dan kondusif.
Ancaman (<i>Threats</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pemanfaatan sumberdaya udang berbasis masyarakat. 2. Pengembangan sistem logistik dalam penyediaan bahan bakar minyak. 3. Penyiapan dan peningkatan kualitas SDM pengawas lingkungan perairan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerjasama usaha penangkapan udang melalui program kemitraan. 2. Peningkatan kesadaran pelaku usaha perikanan udang dan masyarakat pesisir terkait kelestarian lingkungan pesisir dan laut.



Gambar 2. Diagram Analisis SWOT Pengembangan Perikanan Udang

KESIMPULAN

1. Peningkatan kesadaran masyarakat pesisir terhadap kelestarian lingkungannya.
2. Optimalisasi produktivitas perikanan tangkap skala kecil melalui peningkatan kualitas SDM nelayan
3. Penegakkan hukum secara tegas dan peningkatan sistem pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan berbasis masyarakat, termasuk peningkatan kualitas SDM pengawasan.
4. Pengembangan infrastruktur perikanan tangkap, termasuk sistem logistik penyediaan BBM
5. Peningkatan kerjasama usaha penangkapan ikan melalui program kemitraan, untuk menjamin keberlanjutan biaya operasional, dan pengembangan investasi usaha.

6. Pengembangan nilai tambah hasil perikanan tangkap untuk kesejahteraan nelayan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kajian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan publikasi ini. Terima kasih kepada para editor anonim yang telah mereview dan memberikan saran perbaikan naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- DKP Papua Barat. (2016). *Statistik Perikanan Tangkap*. Manokwari: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
- Dwidjowojoto, R. (2007). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hardani, N.H Aulia, H. Andriani, R.A. Fardani, J. Ustiawaty, E.F. Utami, D.J. Sukmana, R.R. Istiqomah. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu: Yogyakarta.

- Hikmayani, Y. R. (2015). *Efektifitas Pemberlakuan Kebijakan Moratorium Kapal Eks Asing dan Transshipment Terhadap Kinerja Usaha Penangkapan Ikan*. Jurnal Kebijakan Sosek Kelautan dan Perikanan Vol 5 No 2 Tahun 2015.
- KEPMEN KP No. 50/Keprmen-KP/2017. (tahun 2017). *Estimasi Potensi JTB dan Tingkat Pemanfaatan SDI di WPPNRI*.
- Mulyatiningsih, Endang. 2011. *Riset Terapan Bidang Pendidikan dan Teknik*. UNY Press: Yogyakarta.
- Pontas M. Pardede. 2011. *Manajemen Strategik Dan Kebijakan Perusahaan*. Mitra Wacana Media, 2011: Jakarta.
- Priyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Zifatama Publishing: Sidoarjo.
- Rahmayanti, A. B. (2016). *Implikasi Kebijakan Moratorium Terhadap Sektor Perikanan di Bitung. Prosiding the 1st International Confererence on Social Sciences and Humanities (ICCSH)*.
- Rangkuti, F. (2006). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Singarimbun, M. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. PT Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta.
- Unipa. (2016). *Laporan Akhir Dampak Ekonomi dan Sosial atas Pemberlakuan Permen KP di Provinsi Papua Barat*. Manokwari: Kerjasama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat.
- Williams, W. 1971. *Social Policy Research and Analysis*. American Elsevier Publishing Company, New York, USA, and Weimer, D.L. and A.R. Vining. 1989. *Policy Analysis: Concept and Practice*. Prentice Hall Inc. Englewoods, J.J., USA.

